



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TEGUH DWI NUGROHO**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BALI**
3. NHK : **106095**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.638.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 141.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 141.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m²/165 m² di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.356.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 376.400.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 175.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO/REVO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
5.500.000
3. MOTOR, HONDA SOLO/SUPRA X Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 5.900.000
4. MOBIL, HONDA HONDA HRV 1.5 S Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 416.300.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 428.377.508**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 2.859.077.508

III. HUTANG Rp. 279.746.451



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.579.331.057

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.